



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENTARGO YUTRI WARDONO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 738161

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	115.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	162.000.000
1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	290.250.000

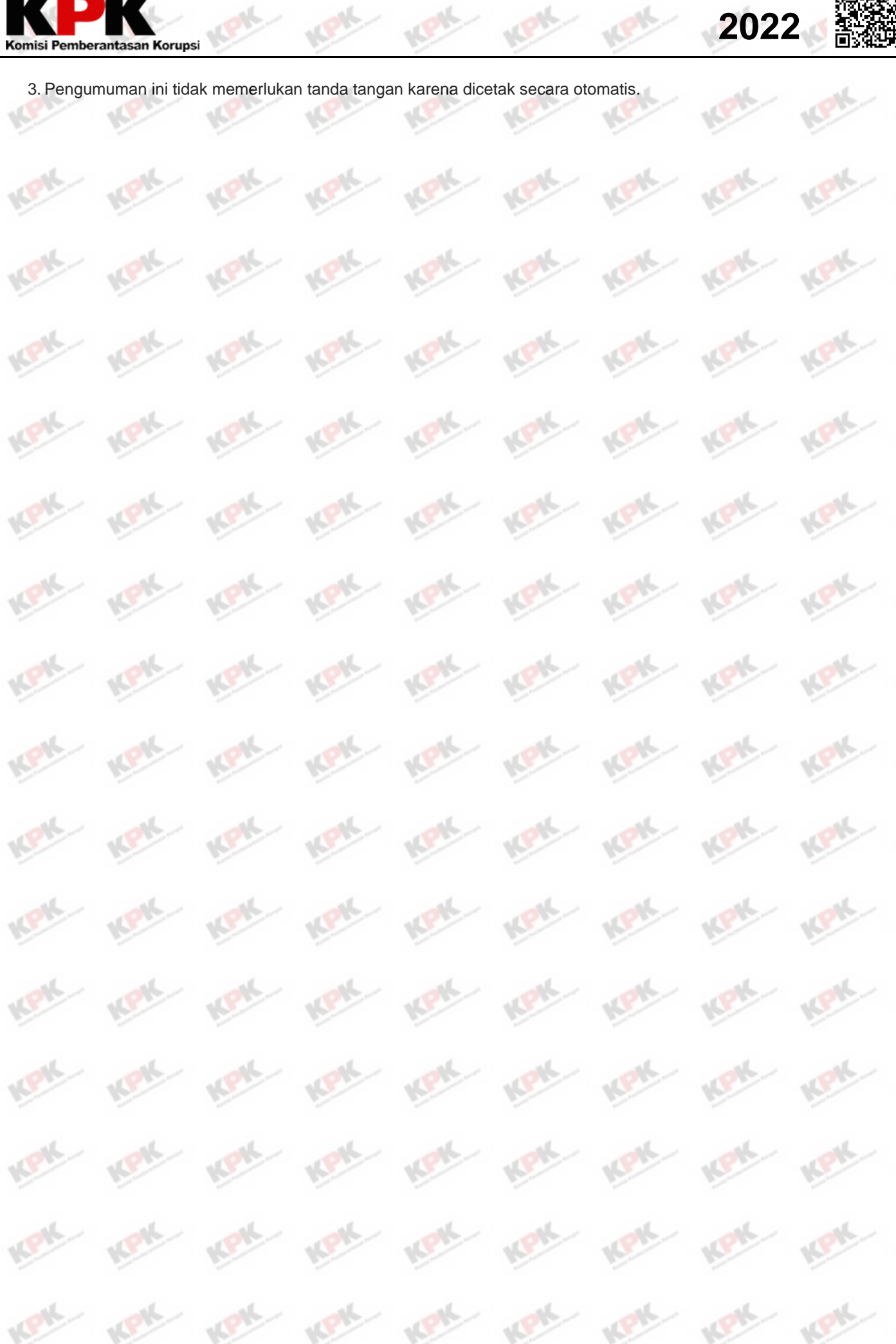
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	290.250.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PONTJO MARBAGJO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 727822

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/90 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 144.400.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT 110 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO TYPE E Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. LAINNYA, UNITED SEPEDA MTB Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 47.280.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.653.966

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 472.333.966

III. HUTANG Rp. 81.298.080

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 391.035.886

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDIE POERNOMO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 737950

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m2/99 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 200.000.000		
2. Tanah Seluas 2960 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	93.000.000
1. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOBIL, NISAN X TRAIL 2,5 ST Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	451.000.000
III. HUTANG	Rp.	130.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	321.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OKTARINA YULIASTANTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 742063

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.970.000.000

1. Tanah Seluas 110 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/110 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/278 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/171 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 324.600.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. MOTOR, HONDA CRF Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 35.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.299.600.000

III. HUTANG

Rp. 460.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.839.600.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIVIEN BUDI ASTUTI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 760166

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	415.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	36.500.000
1. MOBIL, HONDA CIVIC GENIO Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
3. MOTOR, YAMAHA VEGAZR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	21.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	475.300.000
III. HUTANG	Rp.	120.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	355.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAH ARI SETYOWATI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 721679

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	167.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/36 m2 di KAB / KOTA KLATEN, LAINNYA		Rp. 167.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	60.000.000
1. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI		Rp. 5.000.000
2. MOBIL, HONDA CITYZ SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI		Rp. 47.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B3B A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI		Rp. 8.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.509.244
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	230.509.244
III. HUTANG	Rp.	206.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	24.509.244

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.